



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAK)  
BPK PERWAKILAN PROVINSI PAPUA  
TAHUN 2019**



Jayapura  
2020

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan hidayahNya sehingga dapat tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Tahun 2019. LAK ini merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BPK RI. LAK tahun 2019 ini berisi pencapaian dan evaluasi atas sasaran strategis yang telah ditetapkan target kinerjanya dalam Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) tahun 2019.

Hasil pengukuran realisasi anggaran terhadap pelaksanaan 4 target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 23 Target Indikator Kinerja (IK) pada BPK RI Perwakilan Provinsi Papua yang telah ditetapkan dalam dokumen PKPK tahun 2019, adalah sebesar sebesar 45.715.534.488,00 (98, 36%) dari total anggaran Tahun 2019 sebesar Rp46.473.903.000,00.

Dari hasil analisis pengukuran tersebut, masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan diantaranya persentase penyelesaian rekomendasi yang ditindaklanjuti, konsistensi antara rencana pemeriksaan dan pelaksanaan serta ketepatan waktu penyampaian LHP, konsistensi dan akurasi penyajian LHP, pemanfaatan TI, dan jam pelatihan pemeriksa maupun non pemeriksa yang belum memenuhi target.

Akhir kata, tugas BPK RI Perwakilan Provinsi Papua sebagai lembaga negara yang mendapat mandat untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, hanya dapat dilaksanakan dengan mewujudkan BPK RI Perwakilan Provinsi Papua yang bebas, mandiri, dan profesional. Di masa mendatang, BPK RI Perwakilan Provinsi Papua akan terus meningkatkan perannya dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta mewujudkan reformasi birokrasi yang berhasil guna.

Jayapura, Januari 2020

**Kepala Perwakilan,**



**Paula Henry Simatupang**

NIP. 197301111998031001

## DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Papua .....	4
C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Papua .....	6
D. Sumber Daya dan Anggaran BPK Manusia (SDM) Perwakilan Provinsi Papua .....	7
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERNYATAAN KOMITMEN PENCAPAIAN KINERJA (PKPK) PERWAKILAN PROVINSI PAPUA.....	9
A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Papua.....	9
B. Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) BPK Perwakilan Provinsi Papua .....	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI PAPUA (EVALUASI ATAS PENCAPAIAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI PAPUA).....	14
BAB IV PENUTUP .....	23
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 – Struktur Organisasi Perwakilan Provinsi Papua ..... 1

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 dan Undang Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang mewajibkan setiap instansi pemerintah tidak terkecuali Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Kewajiban untuk menyusun LAKIP tidak hanya melekat pada BPK sebagai suatu lembaga, tapi juga unsur-unsur pelaksana BPK sebagaimana dinyatakan dalam peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 13 yang menyatakan bahwa instansi yang wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja diantaranya adalah (c) Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga dan (e) Unit kerja mandiri yang ditetapkan.

#### **B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Papua**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud dalam UU tersebut, BPK dibantu oleh Pelaksana Tugas Pemeriksaan BPK yang salah satu diantaranya adalah Auditorat Utama Keuangan Negara VI (AKN VI). AKN VI mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah pada Departemen Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Departemen Pendidikan Nasional, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Pemerintah Daerah di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dalam pelaksanaan tugasnya, Ditama Revbang didukung oleh Perwakilan Provinsi Papua selaku unsur Pelaksana BPK yang berada di bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara VI.

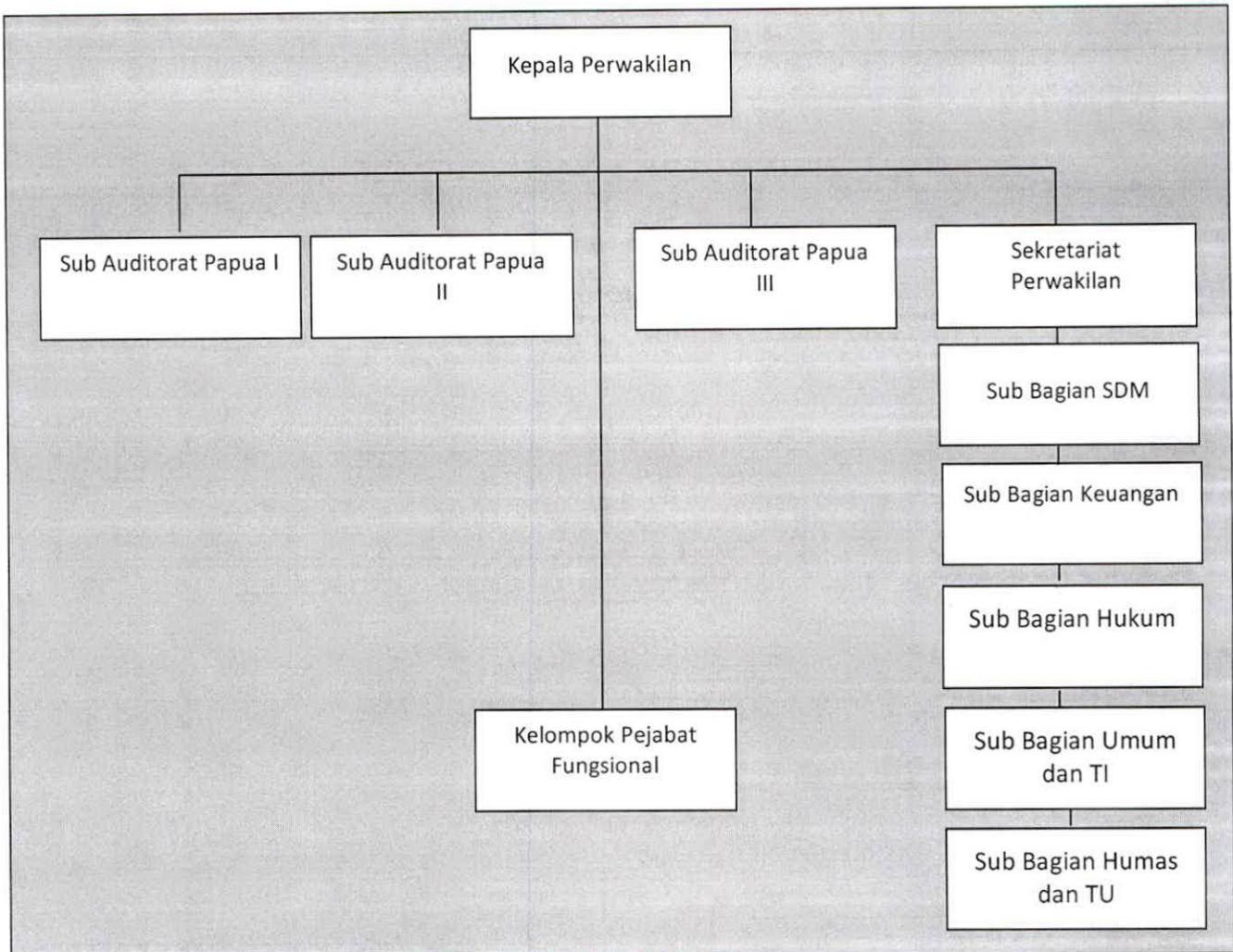
Perwakilan Provinsi Papua memiliki tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Papua, Kota/Kabupaten di Provinsi Papua, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, BPK Perwakilan Provinsi Papua menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan Pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Papua dengan mengidentifikasi indikator kinerja utama berdasarkan kinerja berdasarkan rencana implementasi rencana strategis BPK.
- b. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Papua berdasarkan rencana aksi, serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Papua.
- c. Perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Papua, yang meliputi Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.
- d. Penyusunan program, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Papua, yang meliputi Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.
- e. Pemeriksaan atas obyek-obyek pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.
- f. Pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Papua.
- g. Penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPR tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Papua.
- h. Penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum.
- i. Penyiapan laporan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi untuk disampaikan kepada penegak hukum.
- j. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- k. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Papua yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaan pemangku kepentingan dimaksud.
- l. Pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester pada lingkup tugas BPK Perwakilan Papua, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa dari luar BPK.
- m. Pengelolaan sumber dana manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, sarana dan prasarana, serta administrasi umum.

- n. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Auditor Utama Keuangan Negara VI.
- o. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Auditor Utama Keuangan Negara VI.

**C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Papua**



Gambar 1.1 – Struktur Organisasi Perwakilan Provinsi Papua

Sesuai dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/K/I.VIII.2/7/2014 tanggal 10 Juli 2014 dan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2016 tanggal 3 Februari 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Unit kerja BPK Perwakilan Provinsi Papua dijelaskan sebagai berikut.

**a. Sub Auditorat Papua I**

Bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Papua, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak dan Kabupaten Tolikara, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

**b. Sub Auditorat Papua II**

Bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Waropen, Kabupaten Supiori, dan Kabupaten Biak Numfor, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

**c. Sub Auditorat Papua III**

Bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi, Kabupaten Bouven Digoel, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Asmat, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

**d. Sekretariat Perwakilan**

Bertugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan dukungan administrasi, hukum dan hubungan masyarakat, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi Perwakilan Provinsi Papua.

**D. Sumber Daya dan Anggaran BPK Perwakilan Provinsi Papua**

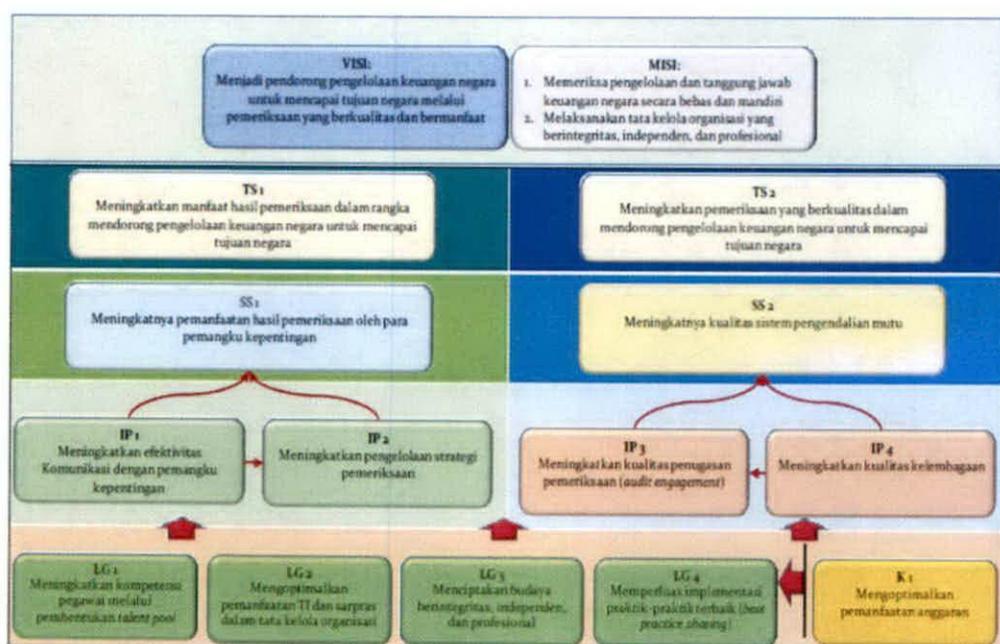
Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada BPK Perwakilan Provinsi Papua berjumlah 157 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Perwakilan, 1 orang Kasetlan, 3 orang Kepala Sub Auditorat, 5 orang Kepala Sub Bagian, 97 auditor, penunjang 10 orang staf, dan tenaga kontrak 24 orang.

Pagu anggaran BPK Perwakilan Provinsi Papua untuk tahun 2019 sebesar Rp46.473.903.000,00.

**BAB II**  
**PERENCANAAN STRATEGIS DAN**  
**PERNYATAAN KOMITMEN PENCAPAIAN KINERJA (PKPK)**  
**PERWAKILAN PROVINSI PAPUA**

**A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Papua**

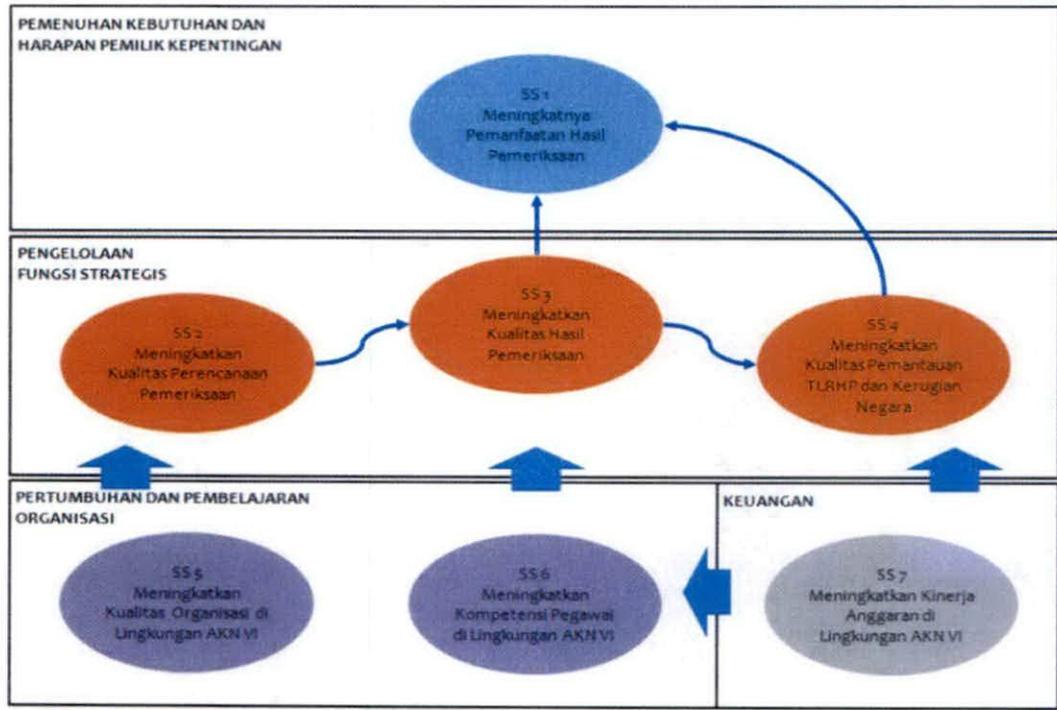
BPK menetapkan 2 sasaran strategis (SS) yang digambarkan dalam bentuk peta strategis BPK *Wide* sebagai berikut:



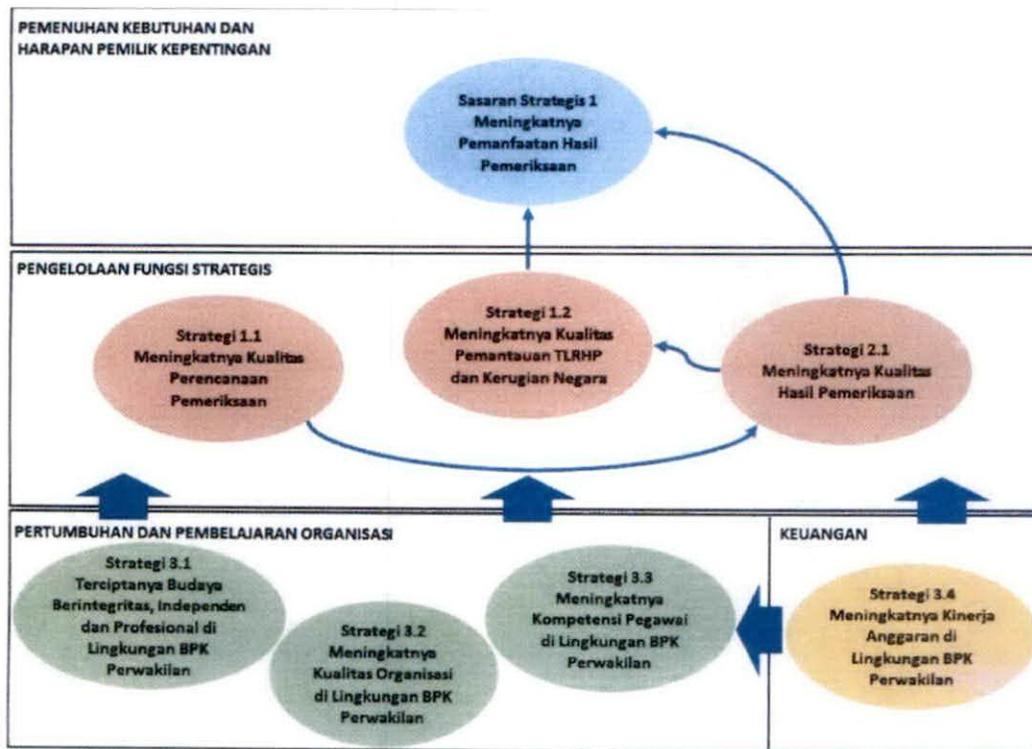
**Gambar 2.1 – Peta Strategis BPK *Wide***

Keterkaitan tugas dan fungsi Auditorat Keuangan Negara VI dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Strategis BPK dapat digambarkan dalam peta strategis Auditorat Keuangan Negara VI berikut ini:

Gambar 2.2 – Peta Strategis AKN VI



Keterkaitan tugas dan fungsi Perwakilan Provinsi Papua dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Strategis BPK dapat digambarkan dalam peta strategis Perwakilan Provinsi Papua berikut ini:



Gambar 2.3 – Peta Strategis BPK Perwakilan Provinsi Papua

#### B. Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) Perwakilan Provinsi Papua

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, Perwakilan Provinsi Papua telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target pencapaian IK. IKU beserta target pencapaiannya dituangkan dalam Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Provinsi Papua selaku Eselon II dan Pejabat Eselon I (dhi. Auditor Utama Keuangan Negara VI).

Berikut Sasaran Strategis, Strategi dan target pencapaian IKU Perwakilan Provinsi Papua Tahun 2019.

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama Tahun 2019		Target Tahun 2019
1	Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
		1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%
		1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%
		1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	2
2	Strategi 1.1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan pemeriksaan	1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	95%
		1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja Terhadap Seluruh LHP	20%
		1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	100%
3	Strategi 1.2 Meningkatnya Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	1.2.1	Tingkat kemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%
		1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	60
		1.2.3	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%
4	Strategi 2.1 Meningkatnya Kualitas Hasil Pemeriksaan	2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan	100%
		2.1.2	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,9
		2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%
		2.1.4	Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	100%
5	Strategi 3.1 Terciptanya Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan	3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK	5,0
		3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,0
		3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%
6	Strategi 3.2 Meningkatnya Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan	3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	AA
		3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%
		3.2.3	Jumlah <i>Best Practice</i> yang Disusun	1
		3.2.4	Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>	100%
		3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100%
		3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	95%
		3.2.7	Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	2
7	Strategi 3.3 Meningkatnya Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan	3.3.1	Presentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%
		3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	100%
8	Strategi 3.4 Meningkatnya Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan	3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	80%

Tabel 2.1 – Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Perwakilan Provinsi Papua

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA PERWAKILAN PROVINSI PAPUA (EVALUASI ATAS PENCAPAIAN KINERJA PERWAKILAN PROVINSI PAPUA)

Perwakilan Provinsi Papua pada Tahun 2019 telah melaksanakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung terpenuhinya sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan. Hasil pencapaian IKU Perwakilan Provinsi Papua di jelaskan sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama Tahun 2019	Target Tahun 2019	Realisasi Pencapaian TW IV Tahun 2019
1 Sasaran Strategis 1 Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	61,71%
	1.2 Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%
	1.3 Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%	100%
	1.4 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	2	2
2 Strategi 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan pemeriksaan	1.1.1 Tingkat Implementasi Strategi	95%	100%
	1.1.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja Terhadap Seluruh LHP	20%	21,74 %
	1.1.3 Tingkat Evaluasi LHP	100%	100%
3 Strategi 1.2 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	1.2.1 Tingkat kemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%
	1.2.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	60	60
	1.2.3 Ketepatan waktu penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian	100%	100%
4 Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	2.1.1 Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan	100%	100%
	2.1.2 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,9	4,47
	2.1.3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	80%
	2.1.4 Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	100%	100%
5 Strategi 3.1 Terciptanya Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan	3.1.1 Indeks Pemahaman Pegawai terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK	5,0	4,44
	3.1.2 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,0	4,75
	3.1.3 Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	100%
6 Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan	3.2.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	AA	A
	3.2.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	95,51%
	3.2.3 Jumlah <i>Best Practice</i> yang Disusun	1	0
	3.2.4 Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>	100%	100%

		3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	95%	95,99
		3.2.7	Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	2	2
7	<b>Strategi 3.3 Meningkatnya Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan</b>	3.3.1	Presentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	95,60
		3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	100%	4,65
8	<b>Strategi 3.4 Meningkatnya Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan</b>	3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	80%	98,36%

Pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Papua secara keseluruhan mengalami peningkatan namun secara pencapaian keluaran mengalami penurunan dikarenakan adanya keterlambatan penyampaian keluaran sehingga tidak dapat diakomodir dalam laporan kinerja, untuk lebih rinci maka dapat di jelaskan sebagai berikut.

### 1. Sasaran Strategis 1. Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan

Sasaran Strategis (SS) 1. Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan terdiri dari 4 indikator kinerja utama (IKU). Hasil yang dicapai dari masing-masing IKU dijelaskan sebagai berikut.

#### a. **IKU 1.1 Persentase penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan**

Tahun 2019 target IKU 1.1 adalah 75% dengan pencapaian 61,71%, atau belum mencapai target sebesar 13,29 % dari target. Belum tercapainya presentase tindak lanjut disebabkan antara lain beberapa pemda fokus pada penanganan pasca konflik, adanya eksodus PNS keluar daerah akibat konflik tahun lalu serta rekomendasi dari hasil pemeriksaan kinerja pada beberapa daerah belum ditindaklanjuti karena rekomendasi hasil pemeriksaan kinerja kecenderungan tidak berdampak hukum atau tidak terjadi kerugian negara.



Pembahasan TLRHP bersama entitas dan Pendampingan Validasi TLRHP oleh Direktorat EPP

Dalam rangka mendorong optimalisasi, pada tanggal 10-12 Juli 2019 Kepala perwakilan Provinsi Papua juga menghadiri dan menyampaikan materi terkait Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada kegiatan Rapat Pemutahiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi/Kabupaten Kota se Provinsi Papua Tahun 2019.



**b. IKU 1.2 Persentase penyampaian LHP yang mengandung unsur tindak pidana ke IPH**

Tahun 2019 target IKU 1.2 adalah 100% dengan pencapaian 100%. Ketercapaian ini antara lain disebabkan karena adanya perubahan struktur organisasi dimana kewenangan menyampaikan LHP yang mengandung unsur tindak pidana ke APH, sudah bukan di Perwakilan tetapi merupakan kewenangan Auditorat Utama Investigasi (AUI).

**c. IKU 1.3 Tingkat pemenuhan permintaan perhitungan kerugian Negara dan pemenuhan permintaan pemberian keterangan ahli**



Ekspose oleh Kejaksaan di kantor BPK Provinsi Papua

Tahun 2019 target IKU 1.3 adalah 100% dengan pencapaian 100%. Ketercapaian ini antara lain disebabkan karena adanya perubahan struktur organisasi dimana kewenangan menyampaikan LHP yang mengandung unsur tindak pidana ke APH, sudah bukan di perwakilan tetapi merupakan kewenangan Auditorat Utama Investigasi (AUI). Selama Tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi Papua menerima beberapa permintaan

perhitungan kerugian Negara dari Kejaksaan dan Kepolisian namun diteruskan kepada AUI untuk diproses, mengingat hal tersebut merupakan kewenangan AUI. Salah satu bentuk koordinasi dengan AUI yaitu adanya penyampaian surat dari Kejaksaan Tinggi Papua kepada AUI melalui Nota Dinas Kalan Papua Nomor Nodin No. 09/ND/XIX/01/2019, 14 Januari 2019, perihal permintaan perhitungan kerugian negara oleh Kejaksaan Tinggi Papua. Bentuk dukungan lainnya adalah pemenuhan permintaan tenaga pemeriksa dari BPK Perwakilan Provinsi Papua di unit AUI untuk membantu proses pemeriksaan investigatif.

**d. IKU 1.4 Jumlah bahan pendapat dan pertimbangan yang dimanfaatkan Ditama Revbang**

Tahun 2019 Target IKU 1.4 adalah 2 bahan pendapat, dengan pencapaian 2 laporan bahan pendapat. Terpenuhinya target IKU ini karena pada Tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi Papua telah menyampaikan usulan 2 bahan pendapat. Pertama melalui Nota dinas nomor 42/ND/XIX.JYP/02/2019, tanggal 28 Februari 2019 perwakilan mengusulkan bahan pendapat berjudul *Status Kepegawaian dan Anggaran untuk Tenaga Non PNS, atas dampak dari proses pengalihan P3D dari pemerintah kabupaten / kota ke pemerintah provinsi*. Melalui Nota Dinas Kepala Direktorat EPP Nomor 273/ND/XII.2/05/2019, perihal Penyampaian Tanggapan atas Usulan Bahan Pendapat, usulan pendapat ini telah diterima sebagai data base UBP.

Kedua melalui Nota dinas nomor 261/ND/XIX.JYP/12/2019, tanggal 10 Desember 2019 perwakilan mengusulkan bahan pendapat berjudul *Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan*.

**2. Strategi.1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan**

Strategis (S) 1.1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pemeriksaan terdiri dari 3 indikator kinerja. Hasil yang dicapai dari masing-masing IK dijelaskan sebagai berikut.

a. **IK 1.1.1 Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan**

Tahun 2019 Tagret IK 1.1.1 adalah 95 %, dengan pencapaian 95%. Tercapainya IKU ini karena seluruh penentuan tema, dan obyek pemeriksaan didasarkan pada Renstra BPK.



Kunjungan Supervisi Tortama KN VI di Jayapura

b. **IK 1.1.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP**

Tahun 2019 Tagret IK 1.1.2 adalah 20 %, dengan pencapaian 21,74 %. Terpenuhinya IK ini karena BPK Perwakilan Provinsi Papua dalam proses perencanaan obyek pemeriksaan kinerja tidak dilakukan secara mandiri namun mengikuti arah dan kebijakan pemeriksaan BPK Pusat, dimana setiap tahun pelaksanaan pemeriksaan kinerja (tematik) juga dilibatkan sebagai subyek. Tahun 2019, jumlah keluaran LHP sebanyak 75 dengan rincian LHP LKPD sebanyak 30 laporan (65,21 %), LHP PDTT sebanyak 10 LHP (21,74%) dan LHP Kinerja sebanyak 6 LHP (13,04 %) sedangkan dan LHP Banpol sebanyak 29 LHP. Khusus untuk Banpol, Pemkab Boven Digoel tidak menganggarkan anggaran bantuan parpol sehingga pemeriksaan tidak dilaksanakan.

c. **IK 1.1.3 Tingkat Evaluasi LHP**

Tahun 2019 Tagret IK 1.1.2 adalah 100 %, dengan pencapaian 80%. Belum terpenuhinya IK ini karena masih ditemukannya kesalahan aritmatik dan kebahasan serta tidakkonsistenan dalam LHP, khususnya LHP LKPD TA 2018.

3. **Strategi 1.2 Meningkatnya Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara**

Strategis (S) 1.2. Meningkatnya Kualitas **Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara** terdiri dari 3 indikator kinerja (IK). Hasil yang dicapai dari masing-masing IK dijelaskan sebagai berikut.

Tahun 2019 target IK 1.2.1 adalah 100% dengan pencapaian 100%. Pencapaian IKU ini karena proses pembahasan dilakukan secara semesteran di kantor BPK Perwakilan Provinsi Papua. Diharapkan dengan penerapan SIPTL dapat mendorong proses pemutakhiran menjadi lebih cepat (tidak persemesteran). Pembahasan Tindak Lanjut dilaksanakan dengan entitas sebanyak 2 kali, yaitu Semester I dilaksanakan pada tanggal 10 s.d 15 Juni 2019 dan Semester II dilaksanakan pada tanggal 2 s.d 13 Desember 2019. Selain kegiatan pemantauan secara manual, BPK Perwakilan Provinsi Papua juga telah melaksanakan update dan validasi data TLRHP pada aplikasi SMP pada Desember 2019. Kegiatan validasi ini didampingi oleh tim dari Direktorat EPP.



Para pemeriksa sedang melaksanakan pengenputan TRLHP kedalam aplikasi SMP

**b. IK 1.2.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara**

Tahun 2019 tagret IK 1.2.2 adalah 60 laporan dengan pencapaian 60 laporan (100%). Pencapaian ini terus dipertahankan selama kurang lebih tiga tahun terakhir.

**c. IK 1.2.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang**

Tahun 2019 tagret IK 1.2.3 adalah 100% dengan pencapaian 50%. Ketidaktercapaian ini disebabkan proses pemantauan Semester II Tahun 2019 (yang dilakukan per Desember) terhambat akibat entitas telah menjalani libur Natal.

**4. Strategi 2.1 Meningkatnya Kualitas Hasil Pemeriksan**

Strategis 2.1 Meningkatnya Kualitas Hasil Pemeriksaan terdiri dari 4 indikator kinerja (IK). Hasil yang dicapai dari masing-masing IK dijelaskan sebagai berikut.

- a. **IK 2.1.1 Pemenuhan *Quality Control* (QC) dan *Quality Assurance* (QA) Pemeriksaan Tahun 2016** target IK 2.1.1 adalah 100% dengan pencapaian 95,45%. Pencapaian ini terus dipertahankan selama kurang lebih tiga tahun terakhir.
- Dari 46 pemeriksaan selama Tahun 2019 (selain banpol), pemenuhan terhadap *Quality Control* (QC) dan *Quality Assurance* (QA) pemeriksaan pada setiap jenjang peran seluruhnya telah terpenuhi.
- b. **IK 2.1.2 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksaan BPK**
- Tahun 2019 target IKU 3.4 adalah 3,9% dengan pencapaian 4,7%. Ketercapaian ini disebabkan karena perwakilan Provinsi Papua menyampaikan kuisisioner pengukuran kepuasan auditee baik menggunakan model kuisisioner dari PMP maupun model kuisisioner Survei Pelayanan Publik sebagaimana diatur dalam Perpres 81 Tahun 2014.
- c. **IK 2.1.3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP**
- Tahun 2019 Target IK 2.1.3 adalah 100 %, dengan pencapaian 80%. Sampai laporan ini disampaikan masih terdapat 9 LHP yang belum diserahkan kepada entitas. Belum terpenuhinya IK ini karena BPK Perwakilan Provinsi Papua mengalami beberapa hambatan sebagaimana dijelaskan sebagai berikut.
- 1) Adanya proses revidi laporan hasil pemeriksaan tematik kinerja oleh tim pusat di Jakarta menjadi salah satu penyebab lambatnya proses penyelesaian laporan hasil pemeriksaan sehingga berdampak pada proses penyerahan kepada DPRD, DPRD, gubernur dan bupati/walikota. Pada hal tim revidi pusat tidak memperhatikan waktu dalam program pemeriksaan yang menjadi acuan dalam perhitungan IKU Perwakilan.
  - 2) Penyerahan LHP Banpol belum sesuai dengan MoU antara BPK dan DPRD/DPRD Kab/kota
  - 3) Sesuai ketentuan pasal 16 ayat (3) PP 1 Tahun 2018 bahwa penyerahan Laporan hasil pemeriksaan diserahkan kepada Parpol, namun sampai saat ini belum ada petunjuk teknis atau MoU yang mengatur tatacara penyerahan tersebut. Dengan demikian, BPK perwakilan menyerahkan hasil pemeriksaan kepada parpol melalui pemerintah daerah dhi. Kesbangpol.
  - 4) Khusus Penyerahan LHP Kinerja dan PDTT, tidak diatur batasan waktu penyerahan sebagaimana penyerahan LHP LKPD. Dalam kesepakatan bersama, dikatakan bahwa penyerahan LHP PDTT dan Kinerja “diserahkan segera setelah laporan hasil pemeriksaan selesai disusun”. Makna “segera” disini tidak jelas kapan batasan waktu tersebut.

- 5) Alat kelengkapan dewan (AKD) pada beberapa pemda belum terbentuk, sehingga penyerahan tidak dapat dilakukan. Khusus untuk hal ini, BPK Perwakilan Provinsi Papua pada tanggal 6 Desember 2019, melalui Nota Dinas Nomor 256/ND/XIX.JYP/2019 telah meminta pendapat hukum Binbangkum.
- 6) Pemberlakuan libur Natal di Papua mulai sejak minggu kedua Desember 2019, berdampak kepada entitas dimana pejabat di Papua yang hampir semuanya berlibur untuk merayakan Natal.
- 7) Dalam program pemeriksaan, tim telah menyusun rencana penyerahan laporan hasil pemeriksaan, namun pencatuman waktu oleh tim tidak mempertimbangkan apakah waktu tersebut telah diketahui/disepakati bersama secara kelembagaan antara BPK dengan DPRD/DPRD/gubernur/bupati/walikota. Hal ini menyebabkan tim tidak memiliki kewenangan mendorong proses penyerahan sesuai waktu dalam program pemeriksaan mengingat waktu yang ditetapkan sudah diluar masa pemeriksaan (surat tugas), dan proses administrasi penyerahan merupakan kewenangan unit kerja kesekretariatan antara menyampaikan undangan, menggandakan LHP dan menyiapkan berita acara.



#### **8) IK 2.1.4 Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK**

Tahun 2019 tagret IK 2.1.4 adalah 100% dengan pencapaian 100%.

## 5. Strategi 3.1 Terciptanya Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan

Strategis 3.1. Terciptanya Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan terdiri dari 3 indikator kinerja utama. Hasil yang dicapai dari masing-masing IK dijelaskan sebagai berikut.



Kalan memberi Pengarahan sebelum pelaksanaan Pemeriksaan

- a. **IK 3.1.1 Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi dan Nilai Dasar BPK**  
Tahun 2019 target IK 3.1.1 adalah 5,0 dengan tingkat ketercapaian mencapai 4,44.
- b. **IK 3.1.2 Indeks Implentasi Nilai Dasar BPK**  
Tahun 2019 target IK 3.1.2 adalah 5,0 dengan tingkat ketercapaian mencapai 4,75.
- c. **IK 3.1.3 Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin**  
Tahun 2019 target IK 3.1.3 adalah 5,0 dengan tingkat ketercapaian mencapai 4,75. Ketercapaian ini menunjukkan bahwa pegawai telah menerapkan nilai-nilai kode etik dalam pelaksanaan tugas.

## 6. Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi dilingkungan BPK Perwakilan

Strategis meningkatkan Kualitas Organisasi dilingkungan perwakilan terdiri dari 7 indikator kinerja (IK). Hasil yang dicapai dari masing-masing IK dijelaskan sebagai berikut.

### a. IK 3.2.1 Hasil evaluasi Itama atas akuntabilitas kinerja

Tahun 2019 target IK 3.2.1 adalah A dengan tingkat ketercapaian mencapai 85,05 atau A. Tercapainya IK ini menunjukkan akuntabilitas telah sesuai target yang ditetapkan.

### b. IK 3.2.2 Tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi

Tahun 2019 target IK 3.2.2 adalah 95% dengan pencapaian 99,51 %. Tercapainya IKU ini disebabkan karena akses jaringan internet di Papua semakin baik.

### c. IK 3.2.3 Jumlah *Best Practice* yang disusun

Tahun 2019 target IK 3.2.3 adalah 1 dengan pencapaian 0%. Belum tercapainya IK 3.2.3 yang Disusun hal ini salah satu disebabkan antara lain karena belum dibentuk tim khusus yang mengelola inovasi di perwakilan.

### d. IK 3.2.4 Tingkat Penerapan *Best Practice*

Tahun 2019 target IK 3.2.4 adalah 100 % dengan pencapaian 100%. Tercapainya IKU ini disebabkan karena BPK Papua telah mereplikasi *Best Practice* dengan judul Pemanfaatan Layanan Pojok Berita Dalam rangka mendukung pemeriksaan. Berita dan informasi yang dikumpulkan telah disebarluaskan melalui web perwakilan.

### e. IK 3.2.5. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja

Tahun 2019 target IK 3.2.5 adalah 100 % dengan pencapaian 100%. Tercapainya IK ini disebabkan karena perwakilan telah berupaya menyerahkan laporan akuntabilitas secara tepat waktu.

### f. IK 3.2.6. Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana

Tahun 2019 target IK 3.2.6 adalah 95% dengan pencapaian 91,19%. Pencapaian IK ini karena BPK pusat terus mendukung pemenuhan sarana dan prasarana di perwakilan sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana kerja yang berlaku di BPK. Standar tersebut merupakan pedoman yang menjadi acuan dalam perencanaan, pengadaan, pendistribusian, serta penataan sarana dan prasarana kerja di lingkungan BPK, untuk mewujudkan suatu pengelolaan sarana dan prasarana yang efektif dan efisien dalam rangka menunjang pelaksanaan dan kelancaran tupoksi di BPK.

### g. IK 3.2.7 Jumlah *Media Relation* yang dilaksanakan

Tahun 2019 target IK 3.2.5. adalah 2 kali dengan pencapaian 2,8 kali. Tercapainya IK ini disebabkan karena perwakilan terus berupaya menyebarluaskan informasi melalui media masa khususnya hasil pemeriksaan BPK. Komunikasi dengan stakeholders

khususnya hasil pemeriksaan BPK. Komunikasi dengan stakeholders khususnya media merupakan kegiatan yang sangat penting bagi BPK Perwakilan Provinsi Papua, untuk memperoleh kesamaan pandangan mengenai peran penting BPK bagi masyarakat, khususnya Provinsi Papua. Pelaksanaan Media Workshop pertama tanggal 05 November 2019 di fame hotel, dan kegiatan kedua berupa konferensi pers tanggal 10 Desember 2019 dikantor BPK Perwakilan.



Pelaksanaan Kegiatan Media Workshop dan Konfrensi Pers bersama para Wartawan

Selain pelaksanaan kedua kegiatan di atas, BPK Perwakilan Provinsi Papua juga telah melaksanakan wawancara khusus dengan Media Antara pada tanggal 4 Agustus 2019 di Ruang Kerja Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua. Dalam acara ini, kepala Perwakilan didampingi oleh Para Kasubaud Papua dan Kasubag Humas dan TU. Materi wawancara terkait peran BPK dalam mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah di wilayah Provinsi Papua dan apa saja hasil yang sudah dicapai oleh BPK khususnya terkait dengan pemulihan kerugian daerah/negara. Selain itu juga, materi terkait pengelolaan dana Otsus Papua juga dibahas dalam pertemuan tersebut.



Wawancara Khusus dengan Media Antara, 4 Agustus 2019

## 7. Sasaran 3.3 Meningkatnya Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan

Strategis 3.3. Meningkatnya Kompetensi Pegawai di lingkungan BPK perwakilan terdiri dari 2 indikator kinerja. Hasil yang dicapai dari masing-masing IK dijelaskan sebagai berikut.

### a. IK 3.3.1 Persentase pemeriksaan yang memenuhi standar jam pelatihan pemeriksaan

Tahun 2019 target 3.3.1 adalah 100% dengan pencapaian 95,60%. Belum tercapainya IKU ini karena terbatasnya jumlah pemeriksa di BPK Perwakilan Provinsi Papua sehingga pada pelaksanaan pelatihan/diklat BPK Perwakilan Provinsi Papua tidak dapat mengirimkan pemeriksa untuk mengikutinya karena seluruh pemeriksa sedang melaksanakan pemeriksaan.



Pembukaan Diklat Teknis Pemeriksaan Laporan Keuangan

### b. IK 3.3.2 Persentasi pegawai yang memenuhi jam pelatihan teknis/manajerial (non pemeriksa)

Tahun 2019 Target IK 3.3.2 adalah 100,00% dengan pencapaian 4,65%. Belum tercapainya IKU ini karena terbatasnya jumlah pegawai non pemeriksa di BPK Perwakilan Provinsi Papua sehingga tidak dapat meninggalkan kantor untuk mengikuti pelatihan.

## 8. Strategi 3.4 Meningkatnya Kinerja Implementasi Anggaran

Tahun 2019 Target Strategis 3.4 ini merupakan upaya Perwakilan Provinsi Papua dalam mendukung pengelolaan keuangan BPK yang efisien, efektif dan ekonomis dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. Pencapaian sasaran ini tercermin dari tingkat pemanfaatan anggaran yang memenuhi target yaitu dari target 80 % penyerapan anggaran telah terealisasi sebesar 74,04%.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

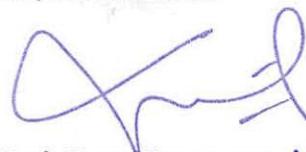
LAK Perwakilan Provinsi Papua ini merupakan sumbangan penyusunan LAKIP Auditorat Keuangan Negara VI sebagai perwujudan akuntabilitas pencapaian kinerja baik keberhasilan ataupun kegagalan dalam mencapai misi dan visi dalam rangka terselenggaranya *good governance* yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme.

Dalam pelaksanaan IKU Tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi Papua belum seluruhnya memenuhi target sebagaimana ditetapkan dalam perencanaan Tahun 2019. Beberapa IK yang belum tercapai antara lain persentase penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan, ketepatan waktu penyampaian LHP, tingkat konsistensi dan akurasi penyajian LHP dan tingkat konsistensi antara rencana pemeriksaan dan pelaksanaan. Namun demikian BPK Perwakilan Provinsi Papua akan terus berupaya untuk meningkatkan capaian kinerja tahun-tahun mendatang.

Penyusunan LAKIP BPK Perwakilan Provinsi Papua ini diharapkan dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan maupun untuk penetapan kebijakan oleh pimpinan BPK.

Jayapura, Januari 2019

**Kepala Perwakilan**



**Paula Henry Simatupang. F**  
NIP. 197301111998031001